

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH, DAN WAKTU PENETAPAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DI KECAMATAN SIDOARJO

Oleh:

POPPY MIRANDA SISKA PUTRI

Sigit Hermawan

Progam Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2024

Pendahuluan

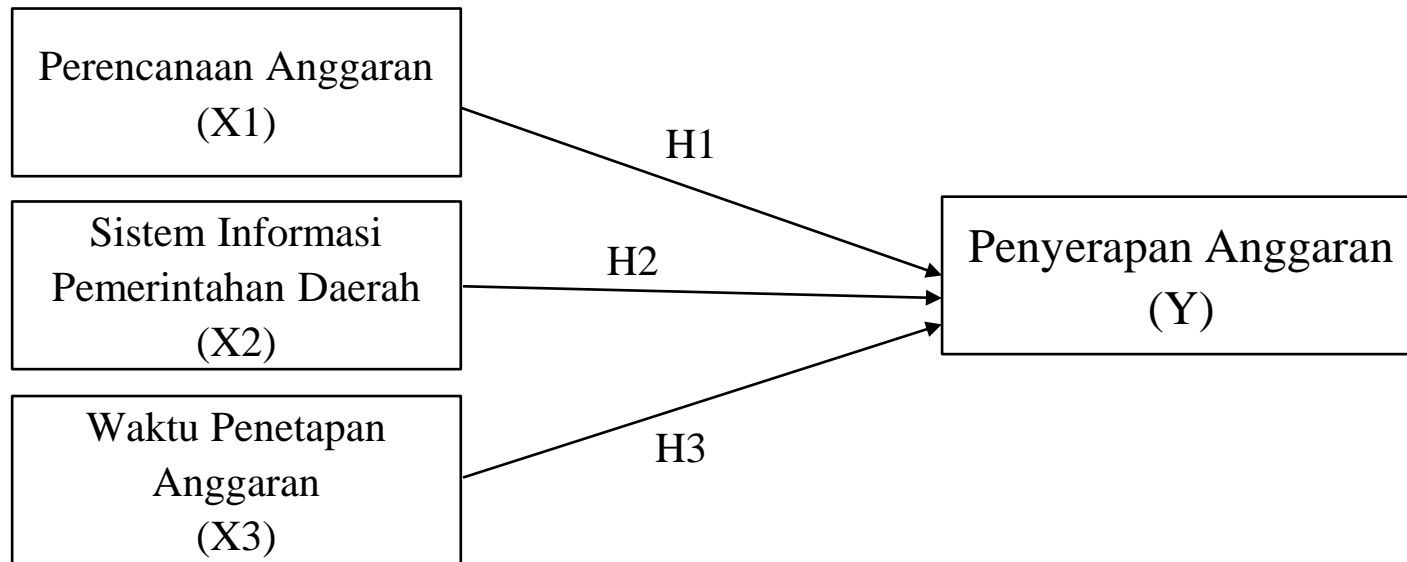
Penyerapan anggaran adalah suatu bentuk pengukuran sejauh mana pemerintah daerah dapat mencapai target yang sudah direncanakan. Apabila sudah mencapai target maka penyerapan anggaran bisa dikatakan berhasil dalam pengelolaan anggaran. Perencanaan anggaran yang buruk akan mencegah peningkatan penyerapan anggaran dan hal ini dapat memperburuk semua kesulitan dalam melaksanakan penyerapan anggaran. Pemerintah daerah saat ini dan di masa depan diharapkan dapat menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan program pembangunan di semua sektor, untuk menyebarkan informasi secara optimal dan melibatkan semua orang dalam skala besar. Informasi Keuangan Daerah Sistem Informasi daerah memungkinkan data keuangan daerah dikelola secara lebih efektif dan efisien melalui berbagai unsur yang saling berhubungan, dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, batas waktu menetapkan APBD ditetapkan paling lambat bulan November.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran?
2. Apakah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran?
3. Apakah Waktu Penetapan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran?

Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi Pemerintahan daerah terhadap Penyerapan Anggaran di Kecamatan Sidoarjo, berikut ini adalah pengembangan hipotesisnya:



Pengembangan Hipotesis

H1: Perencanaan Anggaran Berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran

H2: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran

H3: Waktu Penetapan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran

Metode

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kuantitatif Asosiatif dengan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisisioner dengan metode sensus.

Populasi dan sampel

Populasi berjumlah 52 Orang yang diambil dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejumlah 14 orang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejumlah 14 orang, Bendahara pengeluaran Pembantu (BPP) sejumlah 14 orang, dan Staf Administrasi bagian keuangan sebanyak 10 Orang.

Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan Kuesioner. Kuesioner atau angket digunakan untuk mendapatkan jawaban secara langsung dari responden, memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden

Teknik Analisis

Penggunaan program SPSS digunakan untuk penghitungan analisis regresi linier berganda. Guna menjelaskan hubungan antara dua variable yaitu independen dan variable dependen

Uji Hipotesis

Menggunakan Uji R^2 (Koefisien Determinasi), Uji T

HASIL

- Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan sebanyak 52 dan kuesioner yang diterima kembali sebanyak 52 kuesioner, maka data dapat diolah dengan SPSS. Berikut ini hasilnya:
- Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Pada tabel 2 Hasil Uji Validitas dapat diperoleh nilai R table sebesar 0.2306. masing-masing instrument variabel memiliki nilai pearson diatas 0.2306 dengan r hitung $>$ r tabel 0.2306 sehingga seluruh butir pertanyaan dalam variabel penelitian ini dapat dinyatakan **valid**.

2. Uji Reabilitas

Pada tabel 3 dapat dilihat bahawa *Cronbach's Alpha* dari seluruh variabel bernilai $>$ 0.70 yang artinya seluruh variabel dinyatakan **reliabel**.

HASIL

- Uji Hipotesis

1. Uji Analisis regresi Linear Berganda

Coefficients					
Model	Unstandardized Coefisien		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1. (Constant)	-4.168	5.875		-.710	.408
Perencanaan Anggaran	.521	.158	.367	3.301	.002
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	-.137	.158	-.096	-.866	.391
Waktu Penetapan Anggaran	.907	.148	.611	6.134	.000

a. Dependent Variable Penyerapan Anggaran

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$
$$= -4.168 + 0,521PA - 0,137SIPD + 0,907WPA + \epsilon$$

HASIL

- Uji Hipotesis

2. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R-Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.733 ^a	.537	.508	2.789

•Predictors : (Constant), Waktu Penetapan Anggaran, sistem informasi Pemerintahan Daerah, Perencanaan Anggaran

Hasil pengujian R^2 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* adalah 0.508 atau 50.8%. Menurut nilai ini, nilai Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Waktu Penetapan Anggaran bertanggung jawab atas 50.8% dari variasi Penyerapan Anggaran, sedangkan sisanya sebesar 49.2%. dijelaskan oleh variabel tambahan, yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

3. Uji T

Variabel	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig.	Keterangan
Perencanaan Anggaran	3.301	1.67722	0.002	H1 Diterima
Sistem Informasi Pemerintah Daerah	-0.866	1.67722	0.391	H2 Tidak Diterima
Waktu Penetapan Anggaran	6.134	1.67722	0.000	H3 Diterima

PEMBAHASAN

- **Perencanaan Anggaran Berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran**

Hal ini dapat diartikan bahwa perencanaan anggaran yang baik adalah direncanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ditetapkan dan menyusun kegiatan dengan detail. Semakin baik perencanaan anggaran akan semakin mudah dalam penyerapan anggarannya. Sehingga dapat disimpulkan perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

- **Sistem Informasi Pemerintahan Tidak Berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran**

Hal ini dikarenakan SIPD yang dikembangkan oleh Kemendagri tidak terlepas dari berbagai kekurangan pengembangan perangkat lunaknya. Beberapa kendala yaitu kurangnya koordinasi pengguna SIPD, sering terjadi kesalahan input karena ada banyak menu yang harus diisi, sehingga laporan yang dihasilkan menjadi berbeda.

- **Waktu Penetapan Anggaran Berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran**

Pada dasarnya proses penetapan anggaran yang tepat waktu (sebelum tahun anggaran berakhir) akan mempengaruhi tingkat serapan anggaran, karena jangka waktu atau rentan waktu pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara efisien dan terarah untuk seluruh kegiatan pemerintahan.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menunjukkan apakah perencanaan anggaran, sistem informasi pemerintahan daerah, dan waktu penetapan anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran pada Kelurahan di Kecamatan Sidoarjo. Berdasarkan diskusi hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, (2) sistem informasi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, dan (3) waktu penetapan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ketika tujuan penelitian tercapai adalah penelitian ini digunakan untuk menguji teori yang telah ada sebelumnya. Teori tersebut adalah pengaruh dari Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Waktu Penetapan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di Kecamatan Sidoarjo. Hasil pengujian teori yang digunakan dalam penelitian ini akan menghasilkan pembuktian atau penguatan dari teori sebelumnya terhadap fakta yang terjadi dalam lapangan. Dan sebagai referensi baik itu replikasi atau modifikasi dari penelitian selanjutnya yang memiliki hubungan dengan variabel dalam penelitian ini

Referensi

- [1] S. Abdullah, “Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah,” *KINERJA*, vol. 8, pp. 209–210, Jan. 2017, doi: 10.24002/kinerja.v8i2.898.
- [2] M. Zarinah, D. Darwanis, and S. Abdullah, “Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualias Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara,” *J. Magister Akunt.*, vol. 8, no. 1, pp. 90–97, 2016.
- [3] Suwarni, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Surabaya (Studi Pada SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pematusan). *Publika*, 6(5), 1–7.” *Publika*, vol. 6, no. 5, pp. 1–7, 2017.
- [4] Mutmainna and M. Iqbal, “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” *Assets*, vol. 7, no. 1, pp. 120–132, 2017, [Online]. Available: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/3937>
- [5] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, “UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” *Peraturan.Bpk.Go.Id*, pp. 1–32, 2004, [Online]. Available: http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf
- [6] UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, “Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003,” *Demogr. Res.*, vol. 49, no. 0, pp. 1-33 : 29 pag texts + end notes, appendix, referen, 2003.
- [7] A. Emkhad Arif, Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., “Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011”.
- [8] Gede Sandiasa; Putu Agustana, “Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah”, [Online]. Available: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/824>

Referensi

- [9] P. K. daerah Perda, “Permendagri_No_77_Tahun_2020_Pedoman_Teknis_Pengelolaan_Keuangan_Daerah_1f853ed2a2.pdf.”
- [10] H. G. Muhammad Tamrin, “ANALISIS PERENCANAAN DAN KUALITAS SDM PEGAWAI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG Analysis Of The Planning And Quality Of Employee Human Resources To The Level Of Absorption Of Apbd Budget Through The Regional Financial Information System At The,” *Bata Ilyas Educ. Manag. Rev.*, vol. 1, no. 2, pp. 34–50, 2021.
- [11] permenkes 9 tahun 2014, “Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014,” *Lincolin Arsyad*, vol. 3, no. 2, pp. 1–46, 2014, [Online]. Available: <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- [12] Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah,” *Kementeri. Dalam Negeri Republik Indones.*, vol. Nomor 65, no. 879, pp. 2004–2006, 2019.
- [13] R. Nugroho, “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN (Studi Persepsi Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan),” *J. BPPK Badan Pendidik. dan Pelatih. Keuang.*, vol. 10, no. 1, pp. 22–37, 2017, doi: 10.48108/jurnalbppk.v10i1.23.
- [14] S. B. Surbakti, “Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”.
- [15] C. A. P. dan I. T. R. 2010 Wangi, “No Title,” “*Identifikasi Fakt. Penyebab Terjadinya Keterlambatan dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggar. 2008-2010).*” *Simp. Nas. Akunt. XIII. Univ. Jenderal Soedirman. Purwokerto, 13- 15 Oktober 2010*, 2010.
- [16] N. Laila Yuliani and L. Lestari, “Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja,” *Bus. Econ. Conf. Util. Mod. Technol.*, vol. 3, pp. 648–663, 2022, [Online]. Available: <https://journal.unimma.ac.id>

Referensi

- [17] M. A. S. Rifka Ramadhani, “PENGARUH REGULASI, POLITIK ANGGARAN, PERENCANAAN ANGGARAN, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGADAAN BARANG/ JASA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PADA OPD PROVINSI SUMATERA BARAT”, [Online]. Available: <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/104>
- [18] A. Frankoe, K. Kamaludin, and F. Fadli, “Pengaruh Perencanaan Penganggaran dan E-Procurement terhadap Penyerapan Anggaran,” *Manag. Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 28–55, 2021, doi: 10.33369/tmr.v3i1.19604.
- [19] D. Alfani and J. Nasution, “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara,” *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 6, no. 1, pp. 4036–4043, 2022.
- [20] M. I. Nasution and N. M.Si, “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan,” *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 9, no. 2, p. 109, 2021, doi: 10.29103/jak.v9i2.4577.
- [21] P. Waktu and P. Anggaran, “178330166 - Hashfi Luthfilhadi - Fulltext,” 2022.
- [22] I. Hanif and S. Suparno, “Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran dan Fiscal Stress terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh,” *J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt.*, vol. 2, no. 4, pp. 107–115, 2017, [Online]. Available: <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/5218>
- [23] R. Ruhmaini, S. Abdullah, and D. Darwanis, “Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah,” *J. Perspekt. Ekon. Darussalam*, vol. 4, no. 1, pp. 31–43, 2019, doi: 10.24815/jped.v4i1.10914.
- [24] R. (2016) Rusiadi., Subiantoro, Nur dan Hidayat, “Metode Penelitian : Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan. Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos, Lisrel.”
- [25] C. Malahayati, Islahuddin, and H. Basri, “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh,” *J. Adm. Akunt. Progr. Pascasarj. Unsyiah*, vol. 4, no. 1, pp. 11–19, 2015.
- [26] M. Ramdhan, *Metode penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara., 2021.

Referensi

- [27] B. Nugraha, *Pengembangan uji statistik: Implementasi metode regresi linier berganda dengan pertimbangan uji asumsi klasik*, Pertama. Pradina Pustaka, 2022.
- [28] E. Erliyani and S. Sulastiningsih, “Pengaruh Regulasi, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Aplikasi Sipd Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Magelang,” *J. Ris. Akunt. dan Bisnis Indones.*, vol. 3, no. 4, pp. 1279–1303, 2023, doi: <https://doi.org/10.32477/jrabi.v3i4.854>.
- [29] S. Siamsa, “Penyerapan Anggaran APBD Melalui Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Merauke Berdasarkan Perencanaan Dan Kualitas SDM Pegawai,” *Econ. Digit. Bus. Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 2022–206, 2022, doi: 10.37531/ecotal.v3i1.241.
- [30] R. Ruhmaini, S. Abdullah, and D. Darwanis, “Analisis serapan anggaran belanja pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam,” *Darussalam J. Econ. Perspec*, vol. 4, no. 1, pp. 31–43, 2018, doi: <https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10914>.
- [31] H. Mauliansyah, “PENGARUH WAKTU PENETAPAN ANGGARAN, BESARAN SISA ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (SILPA), DAN PERUBAHAN ANGGARAN TERHADAP SERAPAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUMATERA UTARA).,” Universitas Syiah Kuala, 2017.
- [32] I. Hanif and Suparno, “Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran dan Fiscal Stress terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh,” *J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt.*, vol. 2, no. 4, 2017.

